



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2026/Periodik - 2025)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : A. ZAHRI
2. Jabatan : KETUA
3. NHK : 62787

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

**Rp. 1.308.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 88 m2/88 m2 di KAB / KOTA SITUBONDO, HASIL SENDIRI Rp. 161.000.000
2. Tanah Seluas 5.000 m2 di KAB / KOTA LAMONGAN, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 252 m2/157 m2 di KAB / KOTA LAMONGAN, HASIL SENDIRI Rp. 502.000.000
4. Tanah Seluas 252 m2 di KAB / KOTA LAMONGAN, Rp. 165.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m2/70 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

**Rp. 74.000.000**

1. MOTOR, HONDA PERALATAN MESIN LAINNYA Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

**Rp. 99.250.000**

**D. SURAT BERHARGA**

**Rp. ---**

**E. KAS DAN SETARA KAS**

**Rp. 3.150.000**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	20.000.000
Sub Total	Rp.	1.504.400.000
III. HUTANG	Rp.	16.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.488.400.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.